

Karim Schelkens, John A. Dick,
Jürgen Mettepenningen *Aggiornamento?*,
Catholicism from Gregory XVI to Benedict XVI,
Leiden/Boston: Brill, 2013,
vi+247 hlm.



Membaca buku yang terbit dalam *Brill's Series in Church History* ini mempesona. Buku ini begitu menarik karena menggariskan perjalanan intelektual dan teologis Gereja Katolik sejak Revolusi Prancis (1789-95) dan kekalahan Napoleon (1815) sampai ke tahun 2013, tahun Paus Benedikt XVI mengundurkan diri. Padahal 200 tahun itu adalah tahun-tahun terwujudnya modernitas. Maka buku ini memaparkan dan menganalisa bagaimana Gereja Katolik dan teologinya menghadapi modernitas. Di atas hanya 220 halaman para penulis memperkenalkan pembaca secara ketat, tetapi jelas dan rinci, dengan perkembangan amat dramatis teologi Katolik, dengan peran—selalu peran kunci—para Paus, para teolog dan aliran-aliran teologi Katolik utama. Suatu perjalanan yang mulai dengan penolakan total Gereja terhadap modernitas, melalui tunas-tunas pembaruan sesudah perang dunia pertama yang akhirnya bermuara dalam pembukaan diri Gereja terhadap cita-cita manusia masa kini dalam Konsili Vatikan II (1962-65), namun pembukaan mana justru membawa Gereja ke dalam suatu krisis baru.

Modernitas yang dibahas dalam buku ini mulai dengan revolusi intelektual yang namanya pencerahan dengan segala macam kejutan: Rasionalisme, liberalisme dan sekularisme sebagai ideologi politik baru. Nasionalisme sebagai kekuatan politik amat dahsyat. Restorasi monarki-monarki sesudah kekalahan Napoleon, gerakan-gerakan populis-nasionalis—seperti *Risorgimento* yang akan mempersatukan Italia, dengan sekaligus menghapus Negara Kepausan yang sudah berumur seribu tahun. Dua perang dunia di abad ke-20 yang mengubah wajah Eropa dan akhirnya membongkar kolonialisme dan imperialisme Eropa. Munculnya ideologi-ideologi sekuler keras seperti komunisme dan fasisme. Perang dingin dan anarki sesudah perang dingin selesai.

Para penulis berhasil menempatkan Gereja dalam pusaran global itu. Mereka menunjukkan bagaimana Gereja di bawah Paus Gregor XVI (1831-46), di bawah syok Revolusi Prancis, mengambil sikap konfrontatif total terhadap modernitas, menolak tuntutan demokrasi, kebebasan beragama dan perpisahan antara Gereja dan Negara. Konsili Vatikan I (1869-70) di mana penolakan itu memuncak dibahas secara rinci dengan latar belakangnya dan keanekaan aliran teologis yang sebenarnya kompleks, dan bagaimana Gereja Katolik mendefinisikan diri sebagai Gereja Kepausan. Kita mengikuti bagaimana Gereja kemudian mau mengamankan diri dari tantangan pemikiran filsafat modern dengan menetapkan neo-skolastik sebagai filsafat dan teologi resmi Gereja, bagaimana obsesi anti-modernisme mencapai puncaknya di bawah Paus Pius X (1903-14). Kita membaca tentang ultramontanisme, "gerakan Oxford," perhimpunan ekstrem kanan Prancis *Action Catholique* (yang akhirnya dibubarkan oleh Paus Pius XI [1922-1939]), dan juga tentang *Sodalitium Pianum* ("Persaudaraan Pius"), suatu jaringan rahasia yang memata-matai para dosen teologi dan filsafat, yang kalau dicurigai ketularan "modernisme" dilaporkan ke Roma, lalu dipecat (ada sekitar lima puluh dosen yang disingkirkan sebagai "terjangkit modernisme"). Kita menyaksikan gerakan-gerakan pembaruan yang muncul sesudah PD I seperti gerakan liturgis, gerakan biblis, gerakan ekumenis, para imam buruh dan *nouvelle theologie* ("teologi baru," yang meski 1949 dilarang oleh Paus Pius XII (1939-58) namun akan memberi dorongan-dorongan kunci pada pembaruan Gereja dalam Konsili Vatikan II).

Bahasan luas tentu saja diberikan kepada Konsili Vatikan II (1962-1965) di mana Gereja Katolik berhasil membuka diri: pembaruan liturgi—dengan izin menggantikan bahasa Latin seperlunya dengan bahasa setempat—paham Gereja sebagai umat Allah dalam perziarahan dan tanda keselamatan Ilahi, penegasan bahwa Allah menawarkan keselamatan kepada semua orang, termasuk yang tidak dibaptis, kolegialitas antara Paus dan para uskup, arti kaum awam, makna Kitab Suci, pembukaan diri Gereja Katolik terhadap Gereja-gereja lain, pengakuan bahwa agama-agama lain pun memiliki yang "benar dan suci," dukung-

an penuh terhadap kebebasan beragama, demokrasi dan hak-hak asasi manusia.

Akan tetapi, akhir Konsili Vatikan II tidak membawa ketenangan kepada Gereja. Di akhir tahun 60-an masyarakat-masyarakat Barat digoncangkan oleh semacam revolusi kebudayaan dengan pembebrontakan Kiri Baru, revolusi seks, feminisme, emansipasi kaum Negro di Amerika Serikat dan lain-lain. Dalam Gereja sendiri muncul aliran-aliran teologis baru yang membingungkan Vatikan: teologi ekologis, teologi feminis, teologi jender, *black theology*, pandangan baru terhadap pluralisme dan, paling berpengaruh, teologi pembebasan. Para teolog Katolik sendiri terpecah. Ada yang menuntut agar Paus melanjutkan dinamika Konsili Vatikan II dan melakukan reformasi-reformasi yang digariskan di dalamnya. Tetapi ada juga yang menganggap dokumen-dokumen Vatikan II merupakan batas maksimal perubahan dalam Gereja yang tidak boleh dilampaui, dengan ketaatan kepada Paus sebagai sikap yang tidak dapat ditawar-tawar. Dan ada kelompok kecil radikal konservatif bawah pimpinan Uskup Agung Lefèbvre yang menolak Konsili Vatikan seluruhnya, yang menuduh Gereja dan Paus sudah tidak setia pada ajaran Katolik dan memisahkan diri daripadanya sampai hari ini.

Yang sangat menarik dalam buku ini adalah kisah kesebelas Paus dari Gregor XVI sampai Benedikt XVI (2005-2013). Misalnya Pius IX (1846-1878) yang semula mengambil sikap berbeda dari pendahulunya Gregor XVI dan membuka diri terhadap gagasan demokrasi, namun kemudian syok waktu menyaksikan radikalisme gerakan penya-tuan Italia dan mengambil sikap ekstrem konservatif. Penggantinya Leo XIII (1878-1903) yang tegas melanjutkan garis anti-pencerahan para pendahulunya, tetapi dengan ajaran sosialnya (*Rerum Novarum 1891*) membuat Gereja Katolik melibatkan diri demi keadilan sosial kaum buruh yang akan menjadi orientasi kunci Gereja sampai sekarang. Atau Pius XII yang dari hatinya agak konservatif, tetapi dalam ensiklik *Divino Afflante Spiritu* (1943) memberi kepada para teolog Katolik kebebasan untuk mempelajari Kitab Suci dengan memakai metode kritik biblis paling

modern yang mana barangkali merupakan langkah paling menentukan bagi pembaruan teologi Katolik di kemudian hari.

Dan tentu saja, sosok cemerlang Paus Johannes XXIII (1958-1963) yang penuh kepercayaan pada bimbingan Ilahi dalam Gereja membuka Konsili Vatikan II, dengan menetapkan *aggiornamento* (pembaruan) sebagai tujuannya, dengan memberi kebebasan penuh kepada para uskup. Sementara itu, para Paus kemudian: Paulus VI (1963-78), Johannes Paulus I (1978), Johannes Paulus II (1978-2005) dan Benedikt XVI (2005-2013) sepertinya menjadi ketakutan dengan keberanian Gereja dalam membuka diri. Meskipun mereka meyakini pembaruan-pembaruan yang digariskan dalam Konsili Vatikan II, namun berhadapan dengan segala macam guncangan—termasuk banyak imam meninggalkan imamat dan berkurangnya panggilan imamat dan hidup membiara—mereka semakin mengerem perubahan-perubahan yang nyata, melarang para uskup untuk membicarakan hal-hal tertentu (misalnya selibat wajib para imam dan hal pembatasan kelahiran) dan semakin mensentralisasikan pemerintahan dalam Gereja. Terutama sejak pemerintahan Paus Johannes Paulus II semua hal penting dalam Gereja seluruh dunia diputuskan di Vatikan.

Gambaran Gereja 2013 pada permulaan Kepausan Fransiskus dalam buku ini berkesan ambivalen. Sebenarnya pimpinan—Paus, para Uskup—mendasarkan diri pada paham Gereja Konsili Vatikan II. Tetapi reformasi struktur pemerintahan Gereja tetap macet. Tentang banyak masalah rinci—keluarga berencana, selibat wajib, kemungkinan pe-nahbisan perempuan menjadi imam, desentralisasi kekuasaan, pengangkatan uskup atau peresmian teks-teks liturgi bagi Gereja lokal, misalnya terdapat perbedaan-perbedaan pandangan serius antara banyak teolog Katolik dengan Vatikan. Padahal Gereja adalah komunitas beriman yang dibangun atas keyakinan bahwa Gereja adalah ruang di mana kita bertemu dengan, dan dibimbing oleh, Yesus Kristus. Kekuasaan yang dipegang oleh Paus semata-mata harus demi menunjang panggilan Gereja itu. Kalau dalam umat terjadi kesan bahwa pimpinan Gereja memakai kekuasaan yang ada di tangannya untuk mempertahankan

struktur-struktur kekuasaan yang tidak lagi dapat dilegitimasi atas dasar Injil, kredibilitas Gereja sendiri bisa mengalami kemerosotan. Barangkali keengganan Vatikan untuk mengadakan reformasi nyata bukan karena Vatikan masih, untuk sebagian, terperangkap oleh gambaran Gereja Vatikan I, sebagaimana disindir dalam buku ini, melainkan—mengikuti kritik ideologi Karl Marx—karena Vatikan, seperti setiap aparat, seakan-akan dengan sendirinya mati-matian mau mempertahankan kekuasaan. Apakah Paus Fransiskus yang telah membawa angin baru ke dalam Vatikan akan membawa perubahan? (*Franz Magnis-Suseno, Program Pascasarjana, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta*).